

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Manajemen Pembiayaan Pendidikan

a. Manajemen Pembiayaan Pendidikan Perspektif Islam

Dari sudut pandang Islam manajemen diistilahkan dengan menggunakan kata *al- tadbir* (pengaturan)¹ kata ini merupakan derivasi dari kata *dabbara* (mengatur). Sedangkan pengertian pembiayaan pendidikan dalam Islam adalah untuk seluruh tingkatan sepenuhnya merupakan tanggungjawab negara. Seluruh pembiayaan pendidikan, baik menyangkut gaji para guru/ dosen, maupun menyangkut infrastruktur serta sarana prasarana pendidikan, sepenuhnya menjadi kewajiban negara.²

Allah SWT berfirman dalam Al- Qur'an surat An- Nisa ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. (QS. An-Nisa: 5)³

¹Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), 362.

²Shiddiq Al- Jawi, "Pembiayaan Pendidikan Dalam Islam", *Jurnal House Of Khilafah*, 2007, 1.

³Departemen Agama RI, *Al- Qur'an Dan Terjemahnya Special For Woman*, (Bandung: Syigma Examedia Arkenleema, 2007), 77.

Kaitannya ayat diatas dengan manajemen pembiayaan pendidikan adalah pengelolaan semua bentuk pembiayaan baik usaha memperoleh atau mengumpulkan modal untuk membiayai aktivitas atau kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

Seperti yang tertulis dalam Al- Qur'an surat As- Sajdah ayat 5:

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴿٥﴾

Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu (As Sajdah: 05).⁴

Dari isi kandungan ayat di atas dapatlah kita ketahui bahwa Allah SWT adalah pengatur alam (*Al Mudabbir/Manager*)⁵. Kaitannya dengan manajemen pembiayaan pendidikan adalah pengaturan pembiayaan pendidikan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi pembiayaan tiap tingkat satuan pendidikan.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen pembiayaan pendidikan adalah pengelolaan semua bentuk pembiayaan pendidikan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi pembiayaan tiap tingkat satuan pendidikan.

⁴Departemen Agama RI, *Al- Qur'an Dan Terjemahnya Special For Woman*, (Bandung: Syigma Examedia Arkenleema, 2007), 415.

⁵Ahmad Saefudin, "*Analisis Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Menurut Perspektif Ekonomi Islam*", Skripsi, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017),

b. Model Manajemen Pembiayaan Pendidikan

Ragamnya kondisi dan karakteristik daerah di suatu negara akan mengakibatkan perbedaan sistem pembiayaan yang dikembangkan oleh suatu negara. Keragaman ini ditujukan untuk memberikan keadilan pendidikan yang bermutu sesuai dengan konteks kemampuan daerah dan negara. Thomas H. Jones dalam bukunya *Introduction to school finance: technique and social policy*.

Mengungkapkan tentang model pembiayaan pendidikan antara lain sebagai berikut:

- 1) *Flat Grant*, model ini mendistribusikan dana- dana negara bagian tanpa mempertimbangkan jumlah uang yang berhasil dikumpulkan oleh pajak lokal atau pembagian sama rata.
- 2) *Full State Funding*, model ini pembiayaan ditanggung sepenuhnya oleh negara, yaitu menghapus semua perbedaan lokal, baik dalam pembelanjaan maupun dalam perolehan pajak.
- 3) *The Foundation Plan*, model ini ditekankan pada patokan tarif pajak *Property* minimum dan tingkat pembelanjaan minimum untuk setiap distrik sekolah lokal di negara bagian.
- 4) *Guaranteed Tax Base*, model ini merupakan *Maching Plan*, dimana negara membayar persentase tertentu dari total biaya pendidikan yang diinginkan oleh setiap distrik daerah.
- 5) *Percentage Equalizing*, model ini merupakan bentuk dari *Guaranteed Tax Base* dimana negara menjamin untuk memadukan tingkat- tingkat pembelanjaan tahun pertama di distrik lokal dengan penerimaan dari sumber- sumber negara dan *match* berada pada suatu rasio variabel.
- 6) *Power Equalizing*, model ini memerintahkan distrik- distrik yang sangat kaya untuk membayarkan sebagian pajak sekolah yang mereka pungut ke kantong pemerintah negara bagian.⁶

Fakry menjelaskan bahwa terdapat dua model utama pembiayaan pendidikan dengan pola pikir otonomi daerah, yaitu *Flat Grants* dan *Equalization Grandt* yang berbentuk:

⁶Akdom dkk, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 33- 35.

- 1) Alokasi kepala daerah adalah sama tanpa memperhitungkan adanya variasi dalam jenis dan jenjang pendidikan untuk setiap daerah.
- 2) Alokasi untuk setiap daerah adalah tidak sama karena memperhatikan variasi kebutuhan pendidikan sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Variasi ini dapat disebabkan oleh variasi kemampuan daerah dan daya beli masyarakat, dapat pula disebabkan oleh variasi jenis dan jenjang pendidikan atau *Educational Needs* siswa
- 3) Unit *cost* untuk siswa SD kelas satu tidak sama dengan unit *cost* siswa SD kelas IV dan VI umpamanya. Unit *cost* untuk jenjang SMU tidak sama dengan jenjang sekolah menengah pertama. Pembobotan dengan demikian dapat diterapkan dengan menunjukkan adanya variasi ini. Berdasarkan pembobotan yang menggambarkan adanya variasi, maka unit *cost* per siswa/ tahun dapat ditentukan yang dapat dipakai untuk mengalokasikan dana sesuai jumlah *enrollment* untuk tiap daerah kabupaten atau kota.⁷

Terkait dengan model pembiayaan pendidikan, Amhar berpendapat bahwa terdapat 4 (empat) model pembiayaan pendidikan, yaitu:

- 1) Subsidi penuh dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi;
- 2) Pendidikan gratis pendidikan tinggi diberikan kepada peserta didik sampai usia tertentu;
- 3) Pendidikan gratis diberikan sampai SMA, dan pendidikan tinggi tetap membayar SPP sekalipun masih menerima subsidi; dan
- 4) Semua jenjang pendidikan wajib membiayai diri sendiri. Penggalan sumber dana dapat diperoleh dari upaya kerja sama dengan industri atau memanfaatkan bantuan CSR (corporate social responsibility), membentuk komunitas alumni, atau bersumber dari orangtua/wali peserta didik.⁸

Sedangkan menurut Mulyono, ada sebelas model pembiayaan pendidikan, yaitu:

- 1) Model Flat Grant (*Flat Grant Models*)
- 2) Model Landasan Perencanaan (*Foundation Plan Models*)
- 3) Model Perencanaan Pokok Jaminan Pajak (*Guaranteed Tax Based Plan Models*)
- 4) Model Persamaan (*Equalization Models*)
- 5) Model Persamaan Persentase (*Percentage Equalizing*)
- 6) Model Perencanaan Persamaan Kemampuan (*Power Equalizing Plan*)

⁷Akdom dkk, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*, 35- 36.

⁸Ferdi W. P, "Pembiayaan Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis Financing Of Education: A Theoretical Study", *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 19, No 4, (Desember, 2013), 567.

- 7) Model Pendanaan Negara Sepenuhnya (*Full State Funding Model*)
- 8) Model Sumber Pembiayaan (*The Resource- Cost Model*)
- 9) Model Surat Bukti/ Penerimaan (*Models Choice And Voucher Plans*)
- 10) Model Rencana Bobot Siswa (*The Resource – Cost Model*)
- 11) Pendanaan Berbasis Anak (*Child- Based Funding/CBF*)⁹

Di Indonesia, hingga saat ini tidak ada aturan buku model pembiayaan pendidikan yang digunakan. Akan tetapi, pembiayaan yang ada lebih menunjukkan bauran pembiayaan pendidikan meliputi pembiayaan oleh negara, masyarakat dan investor. Dari beberapa model tersebut, ada lima model yang sekiranya diintegrasikan antara satu dengan yang lain untuk diterapkan di Indonesia, baik pada tingkat pusat maupun daerah yaitu: (1) Model Flat Grant (*Flat Grant Models*), (2) Model Landasan Perencanaan (*Foundation Plan Models*), (3) Model Pendanaan Dana Sepenuhnya (*Full State Funding Models*), (4) Model Rencana Bobot Siswa (*Weighted Student Plan*) Dan (5) Pendanaan Berbasis Anak (*Child- Based Funding/ CBF*)¹⁰

c. Konsep Manajemen Pembiayaan Pendidikan

1) Pengertian Manajemen Pembiayaan Pendidikan

Manajemen berasal dari bahasa latin, yaitu kata *mamus* yang berarti tangan dan *agree* yang berarti melakukan. Kata-kata tersebut kemudian digabung menjadi kata kerja *manager* yang artinya menangani. Kata *manager* diterjemahkan kembali ke dalam bahasa Inggris dengan bentuk kata kerja *to manage*, dengan kata benda *management*, dan orang yang melakukan kegiatan manajemen disebut *manager*.

⁹Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar- Ruzz Media, 2010), 89.

¹⁰ Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan*, 132.

Akhirnya, *management* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan.¹¹

Mary Parker Follet dalam T. Hani Handoko mengatakan bahwa, manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain.¹² Manajemen adalah seni untuk mencapai hasil yang maksimal dengan usaha yang minimal, demikian pula mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan maksimal baik bagi pimpinan maupun para pekerja serta memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat.¹³ Menurut Daft dalam Malayu S.P. Hasibuan, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.¹⁴

Manajemen adalah proses sosial yang berkenaan dengan keseluruhan usaha manusia dengan bantuan manusia lain serta sumber-sumber lainnya, menggunakan metode yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya.¹⁵

Menurut penulis manajemen adalah seni mengatur proses pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumber lainnya yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

¹¹Husaini Usman, *Manajemen: Teori Praktik Dan Riset Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 5.

¹²T. Hani Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 1999), 8.

¹³Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 109.

¹⁴Malayu. S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 89.

¹⁵Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 16-17.

Biaya adalah keseluruhan pengeluaran baik yang bersifat uang maupun bukan uang, sebagai ungkapan rasa tanggung jawab semua pihak terhadap upaya pencapaian tujuan yang sudah ditentukan.¹⁶ Biaya secara sederhana adalah sejumlah nilai uang yang dibelanjakan atau jasa pelayanan yang diserahkan pada siswa.¹⁷ Biaya adalah uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dsb) sesuatu.¹⁸

Menurut penulis biaya adalah sejumlah nilai uang yang dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan demi tercapainya suatu tujuan yang sudah ditentukan.

Dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1, pendidikan adalah:

“suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara”.¹⁹

Menurut Edgar Dalle dalam Dedi Mulyasana pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan yang berlangsung di sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tetap untuk masa yang akan datang.²⁰

¹⁶ Matin, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Konsep Dan Aplikasinya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014),7.

¹⁷ Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. 71.

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

¹⁹ UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003.

²⁰ Dedi Mulyasana, *Pendidikan Bermutu Dan Berdaya Saing*, (Bandung: Rosdakarya, 2012), 4.

Menurut penulis pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan dalam proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Pembiayaan pendidikan terdiri dari dua kata, yaitu “pembiayaan” dan “pendidikan”. Pembiayaan berasal dari kata “biaya” yang artinya pengorbanan sumber ekonomi, yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu.²¹

Biaya pendidikan adalah seluruh pengeluaran baik yang berupa uang maupun bukan uang sebagai ungkapan rasa tanggung jawab semua pihak (masyarakat, orang tua, dan pemerintah) terhadap pembangunan pendidikan agar tujuan pendidikan yang dicita-citakan tercapai secara efisien dan efektif, yang harus terus digali dari berbagai sumber, dipelihara, dikonsolidasikan, dan ditata secara administratif sehingga dapat digunakan secara efisien dan efektif.²²

Biaya pendidikan menurut Nanang Fatah, merupakan nilai rupiah yang digunakan untuk kegiatan pendidikan yang terdiri dari seluruh sumber daya.²³ Menurut Dedi Supriadi, biaya pendidikan merupakan salah satu komponen instrumental (instrumental input) yang sangat penting dalam penyelenggaraan

²¹ Indra Bastian, *Akuntansi Pendidikan*, (Yogyakarta: BPFE, 2015), 339.

²²Matin, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Konsep Dan Aplikasinya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 9-10.

²³Nanang Fatah, *Standar Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 96.

pendidikan (di sekolah).²⁴ Sedangkan menurut Supardi dan Darwiyah Syah, biaya pendidikan adalah biaya yang diperoleh dan dibelanjakan oleh sekolah sebagai suatu lembaga.²⁵

Biaya menempati posisi penting dalam proses pendidikan. Dipastikan bahwa lembaga pendidikan yang bagus ditopang oleh biaya yang memadai. Maka dari itu, pembiayaan pendidikan adalah pengorbanan ekonomis yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga pendidikan, baik itu pendidikan formal, informal, maupun nonformal untuk mencapai tujuan pendidikan, guna memberikan manfaat di masa yang akan datang bagi peserta didik.

Dalam membicarakan pembiayaan pendidikan, ada beberapa konsep penting yang harus dipahami dan diperhatikan yaitu:

- (1) *Opportunity cost* atau disebut pula sebagai biaya nyata (*real cost*) dari suatu kegiatan adalah biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu keputusan tentang penggunaan berbagai sumber daya yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu kegiatan, dan bukan untuk tujuan yang lain.
- (2) *Monetary expenditure* adalah konsep akuntansi yang berhubungan dengan sejumlah pembayaran dengan mata uang untuk pembelian barang atau jasa atau untuk suatu kegiatan.
- (3) *Current expenditure* adalah bentuk pengeluaran biaya yang dilakukan dengan segera dan berulang-ulang.
- (4) *Capital expenditure* adalah bentuk pengeluaran biaya yang dilakukan untuk jangka waktu yang panjang dan akan diulangi sesudah beberapa tahun kemudian.
- (5) *Imputed annual rent* adalah bentuk pengeluaran biaya untuk menyewa fasilitas.
- (6) *Private cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing individu orang tua atau anggota masyarakat untuk membiayai pendidikan anak-anaknya.

²⁴Agus Irianto, *Pendidikan Sebagai Investasi Pembangunan Suatu Bangsa*, (Jakarta: Kencana, 2011), 96.

²⁵Supardi Dan Darwiyah Syah, *Perencanaan Pendidikan*, (Jakarta: Diadit Media, 2010), 108.

- (7) *Social cost* adalah pengeluaran biaya yang dilakukan untuk berlangsungnya pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah.
- (8) *Current price expenditure* dan *constant price expenditure* adalah konsep biaya yang berhubungan dengan harga barang dan jasa pada sistem pendidikan yang memiliki tendensi kenaikan atau penurunan harga.
- (9) *Fixed cost* dan *variable cost* adalah biaya yang sering digunakan oleh perusahaan untuk menentukan tingkat produksi.
- (10) *Total, average, and marginal cost* merupakan konsep biaya yang ditunjukkan untuk menentukan tingkat produksi.²⁶

Manajemen keuangan sekolah merupakan bagian dari kegiatan pembiayaan pendidikan, yang secara keseluruhan menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggung jawabkannya secara efektif dan transparan.²⁷ Suad Husnan juga berpendapat dalam bukunya manajemen pembiayaan menyangkut kegiatan perencanaan, analisis dan pengendalian keuangan.²⁸ Menurut Agus Sartono manajemen keuangan adalah manajemen dana baik berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif maupun usaha pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi atau pembelanjaan secara efisien.²⁹ Manajemen keuangan merupakan tindakan pengurusan/ ketatausahaan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan³⁰.

Dari pengertian manajemen pembiayaan menurut para pakar diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen pembiayaan pendidikan merupakan proses

²⁶ Matin, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Konsep Dan Aplikasinya*, 11- 13.

²⁷ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 193-194.

²⁸ Suad Husnan & Enny Pudjiastutik, *Dasar- Dasar Manajemen Keuangan*, (Yogyakarta: AMP YKPN, 2002), 4.

²⁹ Agus Sartono, *Manajemen Keuangan Teori Dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Andi Ofiset, 2001), 6.

³⁰ Kompri, *Standardisasi Kompetensi Kepala Sekolah*, (Jakarta: Kencana 2017), 155.

pengaturan, dan pengelolaan biaya secara efektif dan efisien dalam usaha pembiayaan pendidikan yang menyangkut perencanaan, pemenuhan, evaluasi dan pertanggungjawaban baik darimana perolehan dana tersebut.

2) Sumber-Sumber Pembiayaan Pendidikan

Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendanaan Pendidikan pasal 46 dan 47 disebutkan bahwa: pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.³¹ Sumber keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah secara garis besar adalah sebagai berikut:

- a) Dana dari pemerintah, dana pemerintah disediakan melalui jalur anggaran rutin dalam Daftar Isian Kegiatan (DIK) yang dialokasikan kepada semua sekolah untuk setiap tahun ajaran. Misalnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana wajib belajar,³² Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) bantuan dari pemerintah pusat kepada sekolah-sekolah berdasarkan jumlah murid yang ada di sekolah tersebut, Bantuan Tata Ruang Kelas Baru (RKB) program yang dialokasikan untuk pembangunan madrasah dengan tujuan untuk membangun ruang kelas atau tempat proses belajar mengajar, bantuan pengadaan Laboratorium PAI, dan Beasiswa Bidik Misi.³³

³¹ UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Pendanaan Pendidikan

³² Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan* 171.

³³ Jejen Musfah, *Manajemen Pendidikan*, (Jakarta: Prenadamedia, 2015), 221.

- b) Dana dari orang tua siswa meliputi: uang pangkal, SPP (bulanan), biaya ekstrakurikuler, biaya remedial, biaya *study tour*, biaya perpindahan, biaya buku tahunan sekolah (BTS), biaya seragam sekolah, dan biaya sukarela.³⁴
- c) Dana dari masyarakat, dana ini biasanya merupakan sumbangan sukarela yang tidak mengikat dari anggota- anggota masyarakat sekolah yang menaruh perhatian terhadap kegiatan pendidikan di suatu sekolah.³⁵
- d) Dana dari alumni, sumbangan sukarela yang tidak mengikat dari mereka yang merasa terpanggil untuk turut membantu kemajuan pendidikan. Misalnya: buku- buku, alat, dan perlengkapan belajar.³⁶

Menurut Supriadi, Keuangan dan pembiayaan pada tingkat satuan pendidikan secara garis besar diperoleh dari subsidi pemerintah pusat, pemerintah daerah, iuran siswa dan sumbangan masyarakat. Yang tercatat dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), sebagian besar biaya pendidikan di tingkat sekolah berasal dari pemerintah pusat, sedangkan pada sekolah swasta berasal dari para siswa atau yayasan.³⁷

Sumber pembiayaan pendidikan bisa berasal dari berbagai pihak, baik itu dari kalangan pemerintah maupun masyarakat. Maka dari itu, pihak sekolah semampu mungkin mengatur pembiayaan agar mampu menggali bakat dan

³⁴ Jejen Musfah, *Manajemen Pendidikan*, 222.

³⁵ Manahan Tampubolon, *Perencanaan Dan Keuangan Pendidikan (Education And Finance Plan)*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 232.

³⁶ Manahan Tampubolon, *Perencanaan Dan Keuangan Pendidikan (Education And Finance Plan)*, 232.

³⁷ Dedi Supriadi, *Satuan Biaya Pendidikan*, (Bandung: Rosda Karya, 2003), 5-6.

kreatifitas peserta didik. Walau dalam keadaan apapun, negara tidak boleh melepaskan tanggung jawabnya terhadap pembiayaan pendidikan.

3) Jenis Pembiayaan Pendidikan

- a) Biaya rutin, yaitu biaya yang harus dikeluarkan dari tahun ketahun, seperti gaji pegawai (guru dan nonguru), serta biaya operasional, biaya pemeliharaan gedung, fasilitas dan alat- alat pengajaran (barang- barang abis pakai).³⁸

Biaya rutin (recurrent cost), merupakan biaya yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pendidikan selama satu tahun anggaran. Biaya ini digunakan untuk menunjang pelaksanaan program pengajaran, pembayaran gaji guru, dan personil sekolah, administrasi kantor, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana.³⁹

- b) Biaya pembangunan, biaya pembangunan misalnya adalah biaya pembelian atau pengembangan tanah, pembangunan gedung, perbaikan atau rehab gedung, penambahan furnitur, serta biaya atau pengeluaran lain untuk barang- barang yang tidak abis pakai.⁴⁰

Menurut Dedy Mulyasana, pembiayaan pendidikan terdiri atas: (1) biaya investasi (meliputi biaya penyediaan sarana prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap), (2) biaya operasi (gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan

³⁸E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 48.

³⁹ Ferdi W. P, "Pembiayaan Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis Financing Of Education: A Theoretical Study", *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 19, No 4, (Desember, 2013), 570.

⁴⁰ Mustari Mohamad, *Manajemen Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2015), 173-175.

pendidikan habis pakai), (3) biaya personal (meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik harus bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan)⁴¹

Sedangkan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, menyebutkan bahwa biaya investasi dan biaya operasional termasuk ke dalam biaya satuan pendidikan, yaitu: a) biaya investasi, yang terdiri atas: (1) biaya investasi lahan pendidikan; dan (2) biaya investasi selain lahan pendidikan. b) biaya operasi, yang terdiri atas: (1) biaya personalia; dan (2) biaya nonpersonalia.⁴²

4) Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah

Dalam Undang- Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.⁴³ Menurut Kompri, prinsip pengelolaan dana pendidikan berdasarkan:

- a) Efisiensi, perbandingan yang terbaik antara masukan (*input*) dan keluaran (*output*) atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi: tenaga, pikiran, waktu, biaya.
- b) Transparansi, keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawaban yang harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak- pihak yang berkepentingan untuk megetahuinya.
- c) Akuntabilitas, penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan⁴⁴

⁴¹ Dedy Mulyasana, *Pendidikan Bermutu Dan Berdaya Saing*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 170.

⁴² Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan

⁴³Manahan Tampubolon, *Perencanaan Dan Keuangan Pendidikan (Education And Finance Plan)*, 189.

⁴⁴ Kompri, *Standardisasi Kompetensi Kepala Sekolah*, 157.

Sedangkan menurut Supardi dan Darwiyah Syah prinsip-prinsip penyusunan anggaran yaitu:

- a) Adanya kejelasan pembagian kekuasaan, wewenang dan tanggung jawab dalam system manajemen dan system organisasi
- b) Menerapkan prinsip-prinsip dan sistem akuntansi
- c) Didahului dengan analisis dan penelitian serta penilaian kinerja organisasi
- d) Perlunya dukungan dari semua lapisan, dari lapisan paling atas sampai lapisan paling bawah
- e) Memperhatikan keseimbangan antara sumber-sumber penerimaan dengan pos-pos pengeluaran anggaran.⁴⁵

Pada umumnya pengeluaran dana yang dihimpun oleh sekolah mencakup lima kategori pembiayaan sebagai berikut: Pemeliharaan, rehabilitas, dan pengadaan sarana/ prasarana pendidikan; Peningkatan kegiatan dan proses pembelajaran; Peningkatan kegiatan pembinaan kesehatan; Dukungan biaya kegiatan sekolah dan peningkatan personel; Kegiatan rumah tangga sekolah dan komite sekolah.⁴⁶

Pemasukan dan pengeluaran keuangan sekolah diatur dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). RAPBS meliputi penganggaran untuk kegiatan pembelajaran, materi kelas, pengembangan profesi guru, renovasi bangunan sekolah, pemeliharaan, buku, meja dan kursi.⁴⁷

RAPBS perlu disusun pada setiap tahun ajaran sekolah dengan memastikan bahwa setiap alokasi anggaran bisa memenuhi kebutuhan sekolah secara optimal. Proses Penyusunan RAPBS (1) menggunakan tujuan jangka menengah dan tujuan jangka pendek yang ditetapkan dalam rencana pengembangan sekolah,

⁴⁵ Supardi dan Darwiyah Syah, *Perencanaan Pendidikan*, 116

⁴⁶ Kompri. *Standardisasi Kompetensi Kepala Sekolah*, 161.

⁴⁷ Kompri. *Standardisasi Kompetensi Kepala Sekolah*, 161.

Menghimpun, merangkum, dan mengelompokkan isu- isu dan masalah utama kedalam berbagai bidang yang luas cakupannya, (2) Menyelesaikan analisis kebutuhan, Memprioritaskan kebutuhan, (3) Mengonsultasikan rencana aksi yang ditunjukkan/ dipaparkan dalam rencana pengembangan sekolah, (4) Mengidentifikasi dan memperhitungkan seluruh sumber pemasukan, (5) Menggambarkan rincian (waktu, biaya, orang yang bertanggungjawab, pelaporan dan sebagainya), dan (5) mengawasi serta memantau kegiatan dari tahap perencanaan hingga evaluasi. Penyusunan RAPBS harus melibatkan kepala sekolah, guru, komite sekolah, staf TU dan komunitas sekolah⁴⁸

Di dalam penyusunan RAPBS dilaksanakan dengan melibatkan beberapa unsur, diantaranya (1) kepala sekolah dibantu para wakilnya yang ditetapkan oleh kebijakan sekolah, (2) orangtua murid dalam wadah komite sekolah, (3) dinas pendidikan kota/ kabupaten, dan (4) pemerintah kota/ kabupaten setempat.⁴⁹

Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa RAPBS perlu disusun pada setiap tahun ajaran sekolah dengan memastikan bahwa setiap alokasi anggaran bisa memenuhi kebutuhan sekolah secara optimal. Dan penyusunan RAPBS harus melibatkan kepala sekolah, guru, komite sekolah, staf TU dan komunitas sekolah.

⁴⁸Manahan Tampubolon, *Perencanaan Dan Keuangan Pendidikan (Education And Finance Plan)*, 234.

⁴⁹Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan*, 151.

d. Indikator Manajemen Pembiayaan Pendidikan

Matin dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Pembiayaan Pendidikan” mengungkapkan bahwa manajemen pembiayaan pendidikan sama dengan pengelolaan anggaran pendidikan. Mulai dari sistem penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengalokasian anggaran, penatausahaan anggaran, pengawasan anggaran, pertanggung jawaban keuangan.

Masing- masing dijelaskan sebagai berikut:

1) Sistem Penganggaran Pendidikan

Dalam penyusunan anggaran, sistematika yang akan tertuang dalam anggaran tersebut akan menggambarkan model penyusunan anggaran yaitu: (1) anggaran butir per butir (*Line Item Budget*), (2) Anggaran Program (*Program Budget System*), (3) anggaran berdasarkan hasil (*Performance Budget*), (4) system perencanaan penyusunan program dan penganggaran (PPBS atau SP4)⁵⁰

Supardi dan Darwiyah Syah mengemukakan empat model desain anggaran dalam penyusunan anggaran yaitu: (1) anggaran butir per butir (*Line Item Budget*), (2) Anggaran Program (*Program Budget System*), (3) anggaran berdasarkan hasil (*Performance Budget*), (4) system perencanaan penyusunan program dan penganggaran (PPBS atau SP4).⁵¹

Sedangkan menurut Alan Thomas J dalam Nanang Fatah, terdapat empat jenis budget yang bisa diadopsi, yaitu: (1) *Budgeting by line item* (2) *budgeting by*

⁵⁰ Uhar Suharsaputra, *Administrasi Pendidikan*, (Bandung: Refika Asitama, 2013), 295.

⁵¹ Supardi Dan Darwiyah Syah, *Perencanaan Pendidikan*, 117.

organizational unit (3) *budgeting by functional category*, dan 4) *Budgeting by program or performance*.

Dalam pelaksanaan penyusunan anggaran model- model di atas bisa dilaksanakan secara sendiri- sendiri atau gabungan beberapa model dan mungkin juga bisa digabungkan seluruh model- model yang ada dengan penyesuaian- penyesuaian yang dianggap perlu.

2) Pelaksanaan Anggaran Pendidikan

a) Hakikat Pelaksanaan Anggaran

Pelaksanaan anggaran pada hakikatnya merupakan kegiatan penyesuaian anggaran dengan memerhatikan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik peraturan perundang-undangan anggaran rutin maupun anggaran pembangunan.⁵²

b) Menentukan Besar Anggaran

Untuk menetapkan besar anggaran yang dibutuhkan dalam suatu program, dibutuhkan informasi tentang biaya langsung dan biaya tidak langsung. Besar anggaran suatu program juga ditentukan oleh adanya upaya untuk mempercepat penyelesaian setiap pekerjaan dalam program tersebut. Misalnya dalam kontrak yang sudah ditandatangani, karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan mungkin saja dipercepat waktu penyelesaiannya. Percepatan waktu penyelesaian

⁵² Matin, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Konsep Dan Aplikasinya*, 92.

pekerjaan sering diistilahkan dengan cash program. Cash program membawa dampak terhadap kenaikan biaya operasional yang tidak sedikit.⁵³

c) Menganalisis Biaya Pendidikan

Biaya pendidikan akan efektif jika dianalisis dengan mempertimbangkan beberapa faktor yaitu:

- (1) Data dan informasi yang tepat dan akurat serta definisi yang jelas tentang komponen sistem pendidikan;
- (2) Rasa memiliki para pengelola pendidikan terhadap dunia pendidikan;
- (3) Pemahaman analisi terhadap data yang bersifat kuantitatif dan kualitatif;
- (4) Socially acceptability (tingkat penerimaan masyarakat terhadap program yang diusulkan);
- (5) Economically beneficial (program yang diusulkan secara ekonomis menguntungkan);
- (6) Organizationally manageable (secara organisatoris program yang diusulkan dapat dikelola); dan
- (7) Ketersediaan sumber daya.⁵⁴

3) Alokasi Anggaran Pendidikan

Alokasi anggaran haru dilakukan secara profesional sesuai dengan kebutuhan masing- masing unit pengeluaran. Alokasi anggaran dapat diperhitungkan untuk satuan pendidikan per murid yang ditetapkan dengan

⁵³ Matin, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Konsep Dan Aplikasinya*, 109.

⁵⁴ Matin, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Konsep Dan Aplikasinya*, 115.

persentase kenaikan sebelumnya misalnya biaya satuan per murid Rp 150.000,- dan bila ingin dinaikkan dengan persentase 20% maka anggaran per satuan pendidikan per murid menjadi Rp 180.000,- dan akan lebih bijaksana lagi apabila penetapan anggaran dimulai dari perhitungan per unit cost yang kemudian dapat dihitung biaya secara keseluruhan. Untuk tingkat satuan pendidikan kemudian baru dibagi jumlah siswa. Setelah anggaran ditetapkan maka anggaran dapat dipecah-pecahkan dan dialokasikan untuk: peningkatan kualitas dan kesejahteraan siswa, peningkatan kualitas dan kesejahteraan personel, penambahan atau rehab ruang kelas atau sarana fisik lainnya seperti laboratorium, perpustakaan dan sebagainya.⁵⁵

4) Penatausahaan Keuangan Pendidikan

a) Pendataan dan Pelaporan Pelaksanaan Keuangan Pendidikan

(1) Mengidentifikasi dan Mengukur Data Keuangan

Pendidikan Dalam kegiatan ini, setiap transaksi pendidikan dicatat secara kronologis dan sistematis selama satu periode tertentu di dalam sebuah atau beberapa buku yang disebut jurnal. Tiap catatan harus ditunjang oleh dokumen keuangan. Satuan pengukur yang tepat digunakan adalah mata uang.

(a) Memproses Data Keuangan Pendidikan

Kegiatan ini mencakup pencatatan, pengelompokkan, dan pengikhtisaran. Pencatatan transaksi adalah pengumpulan data secara kronologis kemudian digolong-golongkan ke dalam kategori tertentu agar penyajian dapat diringkaskan.

(b) Pelaporan Data Keuangan Pendidikan

⁵⁵ Supardi Dan Darwiyah Syah, *Perencanaan Pendidikan*, 113.

Data keuangan pendidikan yang sudah dicatat, dikelompokkan, dan diikhtisarkan harus dilaporkan kepada pihak-pihak yang terkait. Pelaporan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar laporan keuangan berguna dalam proses pengambilan keputusan, maka laporan tersebut harus dianalisis dan diinterpretasikan.

b) Pembukuan Pelaksanaan Anggaran Pendidikan

Pembukuan adalah kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis akuntansi yang melakukan pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran transaksi-transaksi keuangan. Akuntansi selain melakukan pembukuan, juga melakukan pemeriksaan, penyusunan laporan keuangan, penafsiran laporan, dan lain sebagainya.⁵⁶

5) Pertanggungjawaban Keuangan Pendidikan

Penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara rutin sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari orangtua siswa dan masyarakat dilakukan secara terperinci dan transparan sesuai dengan sumberdananya. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari usaha mandiri sekolah dilakukan secara terperinci dan transparan kepada dewan guru dan staff sekolah.⁵⁷

⁵⁶ Matin, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Konsep Dan Aplikasinya*, 137-140.

⁵⁷ Karna Husni, *Manajemen Perubahan Sekolah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 294.

6) Pengawasan Anggaran

Pengawasan keuangan di sekolah dilakukan oleh kepala sekolah dan instansi pertikal di atasnya, serta aparat pemeriksa keuangan pemerintah. Kegiatan pengawasan pelaksanaan anggaran dilakukan dengan maksud untuk mengetahui: (a) kesesuaian pelaksanaan anggaran dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan dengan prosedur yang berlaku, (b) kesesuaian hasil yang dicapai baik dibidang teknis administratif maupun teknis operasional dengan peraturan yang ditetapkan, (c) kemanfaatan sarana yang ada (manusia, biaya, perlengkapan, dan organisasi) secara efektif dan efisien, dan (d) system yang lain atau perubahan system guna mencapai hasil yang sempurna.⁵⁸

2. Mutu Sarana Prasarana Pendidikan

a. Mutu sarana prasarana persepektif islam

Dalam Al-Qur'an bisa ditemukan ayat- ayat yang menunjukkan bahwa pentingnya sarana dan prasarana atau alat dalam pendidikan. Makhluk Allah berupa hewan yang dijelaskan dalam Al- Qur'an juga bisa menjadi alat dalam pendidikan. Seperti nama salah satu surat dalam Al- Qur'an adalah An – Nahl yang artinya lebah. Dalam ayat ke 68- 69 disurat itu Allah menerangkan yang artinya adalah sebagai berikut:

⁵⁸Karna Husni, *Manajemen Perubahan Sekolah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 291.

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿٦٨﴾ ثُمَّ كُلِي
 مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلَالًا ۗ تَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ
 لِلنَّاسِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٩﴾

Dan tuhanmu mewahyukan kepada lebah: “ buatlah sarang- sarang di bukit- bukit, di pohon- pohon kayu, di tempat- tempat yang dibikin manusia”, kemudian makan lah dari tiap- tiap (macam) buah- buahan dan tempuhlah jalan tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). Dari perut lebah itu kelur minuman (madu) yang bermacam- macam warnanya, didalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada demikian itu bener- bener terdapat tanda (kebesaran tuhan) bagi orang- orang yang memikirkan.⁵⁹

Ayat diatas menjelaskan bahwa lebah bisa menjadi media atau alat bagi orang- orang yang berpikir untuk mengenal kebesaran Allah yang pada gilirannya akan meningkatkan keimanan dan kedekatan (*taqarrub*) seorang hamba kepada Allah SWT. Nabi Muhammad Saw dalam mendidik para sahabatnya juga selalu menggunakan alat atau media, baik berupa benda maupun non-benda. Salah satu alat yang digunakan Rasulallah dalam memberikan pemahaman kepada para sahabatnya adalah dengan menggunakan gambar.

Diriwayatkan oleh Iman Ahmad dan Al- Hakim dari Abdullah bin Mas’ud, ia berkata, “Rasalullah membuatkan kami garis dan bersabda, “ini jalan Allah”. Kemudian membuat garis- garis disebelah kanan dan kirinya, dan bersabda, “ini adalah jalan- jalan (setan)”. Yazid berkata, “ (garis- garis) yang berpencar- pencar”. Rasullah SAW bersabda, “disetiap jalan ada setan yang mengajak kepadanya. Kemudian beliau membaca ayat Al- Qur’an (Q. S. Al- An’am: 153).

⁵⁹Departemen Agama RI, *Al- Qur’an Dan Terjemahnya Special For Woman*, (Bandung: Syigma Examedia Arkenleema, 2007), 267.

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انْتظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ

Dan bahwa (yang kami perintahkan ini) adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan- jalan (yang lain), karena jalan- jalan itu menceraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa.⁶⁰

Hadis diatas terlihat jelas bahwa Rasulullah Saw menggunakan garis- garis sebagai alat pendidikan untuk menjelaskan apa yang ingin beliau sampaikan kepada para sahabatnya.

Sarana prasarana pendidikan adalah semua perangkat atau fasilitas perlengkapan dasar yang secara langsung dan tidak langsung dipergunakan untuk menunjang proses pendidikan dan demi tercapainya pendidikan Islam, khususnya proses belajar mengajar.

b. Model Sarana Prasarana Pendidikan

Sarana pendidikan merupakan salah satu pondasi utama untuk mencapai tujuan pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/media dalam mencapai maksud atau tujuan. Apabila dilihat dari habis tidaknya dipakai ada dua macam, yaitu sarana pendidikan yang habis pakai dan sarana pendidikan yang tahan lama. Apabila dilihat dari bergerak atau tidaknya saat pembelajaran juga ada dua macam, yaitu bergerak dan tidak

⁶⁰Departemen Agama RI, *Al- Qur'an Dan Terjemahnya Special For Woman*,(Bandung: Syigma Examedia Arkenleema, 2007),128.

bergerak. Sementara jika dilihat dari hubungannya sarana tersebut terhadap proses pembelajaran, ada tiga macam, yaitu alat pelajaran, alat peraga, dan media pembelajaran.⁶¹

Menurut Bafadal, jenis sarana dan prasarana adalah sebagai berikut:⁶²

1) Dilihat Dari Habis Tidaknya Dipakai

Dilihat dari habis tidaknya dipakai, ada dua macam sarana pendidikan, yaitu sarana pendidikan yang habis dipakai dan sarana pendidikan tahan lama.

- a) Sarana pendidikan yang habis dipakai adalah segala bahan atau alat yang apabila digunakan bisa habis dalam waktu yang relatif singkat. Contoh, kapur tulis, beberapa bahan kimia untuk praktik guru dan siswa. Selain itu, ada sarana pendidikan yang berubah bentuk, misalnya kayu, besi, dan kertas karton yang sering digunakan oleh guru dalam mengajar. Contoh: pita mesin ketik atau komputer, bola lampu, dan kertas.
- b) Sarana pendidikan tahan lama adalah keseluruhan bahan atau alat yang dapat digunakan secara terus menerus dan dalam waktu yang relatif lama. Contohnya bangku sekolah, mesin tulis, atlas, globe, dan beberapa peralatan olah raga. Sarana pendidikan yang habis pakai hendaknya dikelola dengan sebaik mungkin dengan adanya catatan persediaan barang, sehingga barang yang akan habis dapat segera terpenuhi apabila dibutuhkan, sedangkan sarana pendidikan yang tahan lama tentunya dapat dijaga kesesuaian fungsinya, sehingga dapat dipergunakan dalam jangka waktu yang panjang.

⁶¹ Barnawi & M. Arifin, *Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 49.

⁶² Ibrahim Bafadal, *Manajemen Perlengkapan Sekolah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 2.

2) Dilihat Dari Wujudnya

Dilihat dari wujudnya, sarana ada yang berupa perangkat keras (*hardware*) seperti alat-alat praktikum dan media pendidikan. Ada juga yang berupa perangkat lunak (*software*) misalnya kurikulum, bahan atau program yang harus dipelajari, dan pedoman belajar.

Sedangkan prasarana pendidikan adalah alat yang secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar, seperti ruang teori, ruang perpustakaan, ruang praktik keterampilan, dan ruang laboratorium.

Penelitian Putri Isnaini Kurniawati dan Suminto A Suyuti dalam Ibrahim Bafadel, mengklasifikasikan menjadi beberapa macam sarana pendidikan, yaitu ditinjau dari sudut: 1) habis tidaknya pakai, 2) bergerak tidaknya pada saat digunakan, 3) hubungannya dengan proses belajar mengajar. Sedangkan prasarana pendidikan di sekolah bisa diklasifikasikan menjadi dua macam. Pertama, prasarana pendidikan yang langsung digunakan untuk proses belajar mengajar seperti ruang teori, ruang perpustakaan, dan ruang laboratorium.. Kedua, prasarana sekolah yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar seperti ruang kantor, kantin sekolah, ruang UKS, kamar kecil, ruang guru, ruang kepala sekolah, dan tempat parkir kendaraan.⁶³

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa klasifikasi sarana prasarana pendidikan yaitu ditinjau dari sudut (1) habis tidaknya dipakai, (2)

⁶³ Putri Isnaeni Kurniawati Dan Suminto A. Sayuti, Manajemen Sarana Dan Prasarana Di Smk N 1 Kasihan Bantul, *Jurnal Akutabilitas Manajemen Pendidikan*, Volume 1, Nomor 1, 2013, 101.

bergerak tidaknya pada saat digunakan, (3) hubungannya dengan proses pembelajaran. Sedangkan prasarana pendidikan adalah alat yang secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar.

c. Konsep Mutu Sarana Prasarana Pendidikan

Mutu mengandung makna derajat (tingkat) keunggulan suatu produk (hasil kerja/ upaya) baik berupa barang maupun jasa, baik yang *tangible* (dapat dipegang) maupun *intangibile* (tidak dapat dipegang).⁶⁴ Mutu adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, manusia, proses dan tugas serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pengguna atau konsumen.⁶⁵

Menurut peneliti mutu adalah ukuran atau tingkat kualitas yang telah memenuhi atau melebihi harapan pelanggan.

Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana.

Sarana adalah Peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dalam menunjang proses pendidikan.⁶⁶ Daryanto, mendefinisikan sarana adalah alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan. Misalnya buku, perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya.⁶⁷ Menurut Thalib Kasan sarana

⁶⁴ Suryosubroto, *Beberapa Aspek Dasar- Dasar Kependidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 210.

⁶⁵ Zulkarnain Dali, *Manajemen Mutu Madrasah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 92.

⁶⁶ Kompri, *Manajemen Sekolah*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 193.

⁶⁷ Daryanto, *Administrasi Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Karya, 2001), 51.

pendidikan adalah alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan, misalnya: ruang, buku, perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya.⁶⁸ Sedangkan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran. Seperti halaman, kebun, taman, dan sekolah.⁶⁹

Soetjipto dan Kosasi, mengartikan sarana prasarana pendidikan adalah semua benda bergerak maupun yang tidak bergerak yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁷⁰ Selain itu, Ibrahim Bafadal, menyatakan bahwa sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah, sedangkan prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah.⁷¹

Barnawi & M. Arifin, mendefinisikan sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan disekolah. Prasarana pendidikan berkaitan dengan semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan

⁶⁸ Tholib Kasan, *Teori dan Aplikasi Administrasi Pendidikan*, (Jakarta : Studia press, 2000), 91.

⁶⁹ Sri Minarti, *Manajemen Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri*, (Yogyakarta: Ar- Ruzz Media, 2011), 225.

⁷⁰ Soejipto dan Kosasi, *Profesi Keguruan*, (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2004), 170.

⁷¹ Ibrahim Bafadal, *Manajemen Perlengkapan Sekolah Teori Dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 2.

proses pembelajaran di sekolah. Penekanan pada pengertian tersebut adalah pada sifatnya, sarana bersifat langsung dan prasarana tidak bersifat langsung.⁷²

Mulyasa, menjelaskan bahwa sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan untuk menunjang proses pendidikan, khususnya dalam proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi serta alat-alat dan media pengajaran. Adapun yang dimaksud prasarana pendidikan atau pengajaran dalam proses pembelajaran, seperti halaman sekolah, kebun sekolah, taman sekolah, dan jalan menuju sekolah.⁷³

Muhammad Joko Susilo, menjelaskan sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja kursi, serta alat-alat dan media pengajaran, adapun yang dimaksud dengan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran, seperti halaman, kebun, taman sekolah, jalan menuju sekolah, tetapi jika dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar mengajar, seperti taman sekolah untuk pengajaran biologi, halaman sekolah sebagai sekaligus lapangan olahraga, komponen tersebut merupakan sarana pendidikan.⁷⁴

Berdasarkan pengertian sarana dan prasarana di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sarana dan prasarana merupakan komponen dalam proses

⁷² Barnawi & M. Arifin, *Manajemen Sarana Dan Prasaranan Sekolah*, (Yogyakarta: Ruzz Media, 2012), 47.

⁷³ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 49.

⁷⁴ Muhamad Jokosusilo, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Manajemen Pelaksanaan Dan Kesiapan Sekolah Menyongsongnya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 56.

pembelajaran yang mendukung potensi masing-masing peserta didik di setiap satuan pendidikan baik formal maupun non formal. Pengertian sarana pendidikan itu sendiri adalah segala peralatan atau barang baik bergerak ataupun tidak yang digunakan secara langsung untuk proses pendidikan, sedangkan prasarana adalah semua perangkat yang tidak secara langsung digunakan untuk proses pendidikan. Sarana dan prasarana merupakan suatu kebutuhan yang harus tersedia untuk mendukung kegiatan pembelajaran dan peningkatan mutu pendidikan serta dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Sarana prasarana pendidikan itu sebaiknya dikelola dengan sebaik mungkin dengan mengikuti kebutuhan-kebutuhan sebagai berikut:

- a) Lengkap, siap, dipakai setiap saat, kuat dan awet.
- b) Rapi, indah, bersih, anggun, dan asri sehingga menyejukkan pandangan dan perasaan siapa pun yang memasuki kompleks sekolah
- c) Kreatif, inovatif, responsif, dan bervariasi sehingga dapat merangsang timbulnya imajinasi peserta didik.
- d) Memiliki jangkauan waktu yang panjang melalui perencanaan, yang matang untuk menghindari kecenderungan bongkar pasang bangunan.
- e) Memiliki tempat khusus untuk beribadah maupun pelaksanaan kegiatan sosio-religius seperti musolah dan masjid.⁷⁵

⁷⁵ Mustari Mohamad, *Manajemen Pendidikan*, 121.

Penggunaan sarana prasarana adalah pemanfaatan segala jenis barang yang sesuai dengan kebutuhan secara efektif dan efisien. Dalam hal pemanfaatan sarana, harus mempertimbangkan hal berikut:

- a) Tujuan yang akan dicapai
- b) Kesesuaian antar media yang akan digunakan dengan materi yang akan dibahas
- c) Tersedianya sarana dan prasarana penunjang
- d) Karakteristik siswa ⁷⁶

Tabel 2.1
Prasarana Sekolah (Permendiknas No. 24 Tahun 2007)

SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA
Ruang kelas	Ruang kelas	Ruang kelas
Ruang perpustakaan	Ruang perpustakaan	Ruang perpustakaan
Laboratorium IPA	Laboratorium IPA	Ruang laboratorium
Ruang pimpinan	Ruang pimpinan	biologi
Ruang guru	Ruang guru	Ruang laboratorium
Tempat beribadah	Ruang tata usaha	fisika
Ruang UKS	Tempat beribadah	Ruang laboratorium
Jamban	Ruang konseling	kimia
Gudang	Ruang UKS	Ruang laboratorium
Tempat bermain/ berolahraga	Ruang organisasi	computer
	Kesiswaan	Ruang laboratorium
	Jamban	bahasa
	Gudang	Ruang pimpinan
	Ruang sirkulasi	Ruang guru
	Tempat bermain/ berolahraga	Ruang tata usaha
		Tempat beribadah
		Ruang konseling
		Ruang UKS
		Ruang organisasi
		kesiswaan
		Jamban
		Gudang
		Ruang sirkulasi
		Tempat bermain/ berolahraga

⁷⁶ Mustari Mohamad, *Manajemen Pendidikan*, 127.

d. Indikator Mutu Sarana Prasarana

Ditinjau dari fungsi atau peranannya terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar, maka sarana pendidikan (sarana material) dibedakan menjadi 3 macam:

- 1) Alat pelajaran, alat atau benda yang dipergunakan secara langsung oleh guru maupun murid dalam proses belajar mengajar.
- 2) Alat peraga, segala sesuatu yang digunakan oleh guru untuk memperagakan atau memperjelas pelajaran.
- 3) Media pengajaran, suatu sarana yang digunakan untuk menampilkan pelajaran.

Sedangkan yang termasuk prasarana pendidikan adalah bangunan sekolah dan alat perabot sekolah.⁷⁷

Menurut Suharsimi Arikunto, bahwa yang termasuk ke dalam klasifikasi prasarana pendidikan adalah:⁷⁸

- 1) Bangunan sekolah (tanah dan gedung) yang meliputi: lapangan, halaman sekolah, ruang kelas, ruang guru, kantor, ruang praktek, ruang tamu, ruang kepala sekolah, ruang perpustakaan, laboratorium, mushala, dan kamar kecil.
- 2) Perabot sekolah, yang meliputi: meja guru, meja murid, kursi, lemari, rak buku, sapu, dan kotak sampah.

Menurut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 079/1975, sarana dan prasarana pendidikan terdiri dari tiga kelompok besar, yaitu:

- 1) Bangunan dan perabot sekolah.
- 2) Alat pelajaran yang terdiri dari, pembukuan, alat-alat peraga, dan laboratorium.
- 3) Media pendidikan yang dapat dikelompokkan menjadi audiovisual yang menggunakan alat penampil dan media yang tidak menggunakan alat penampil.⁷⁹

⁷⁷ Suryosubroto, *Manajemen Pendidikan Di Sekolah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 114.

⁷⁸ Arikunto. S, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 136.

⁷⁹ Nur Indah Fadhilah, “*Peranan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Guna Menunjang Hasil Belajar Siswa Di SD Islam Al Syukro Universal*”, skripsi, (Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah, 2014), 8.

Menurut Dirjen Dikdasmen Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bahwa sarana pendidikan ditinjau dari fungsinya dapat dikelompokkan menjadi empat macam yaitu:

- a) Sarana fisik sekolah meliputi: (1) bangunan sekolah, yang terdiri dari ruang kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang tata usaha dan lain- lain; (2) perabot sekolah, meliputi: kursi, meja belajar, meja kerja, papan tulis, dan lain- lain; (3) sarana tata usaha pendidikan, meliputi: buku induk siswa, buku rapor, alat tulis, dan alat- alat kantor lainnya.
- b) Media pendidikan meliputi: (1) perangkat keras atau *hardware*, yaitu segala jenis alat penampilan elektronik untuk menyampaikan pesan-pesan dalam kegiatan pembelajaran, meliputi: *OHP*, *tape recorder*, televise, computer dan lain sebagainya; (2) perangkat lunak atau *software*, yaitu segala jenis atau materi pengajaran yang disampaikan melalui alat penampil dalam kegiatan pembelajaran.
- c) Alat peraga meliputi: (1) alat peraga yang dipergunakan dalam kegiatan pembelajaran sebagai sarana penjelas dan memvisualisasikan konsep, ide atau pengertian tertentu yang terdiri dari: gambar- gambar anatomi, rangka badan, diagram, globe, peta dan lainsebagainya; (2) alat praktik yaitu alat yang berfungsi sebagai sarana untuk dilatih mencapai keterampilan tertentu.
- d) Pembukuan sekolah meliputi macam- macam buku yang dipergunakan dalam proses pembelajaran.⁸⁰

Eko Djatmiko, dalam penelitiannya mengatakan indikator keberhasilan sarana prasarana yaitu 90 % sekolah memiliki sarana prasarana minimal sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan secara nasional (meliputi lahan, bangunan/ perabot/ peralatan/ laboratorium dan media pembelajaran) 100 % peserta didik memiliki buku pelajaran yang lengkap setiap mata pelajaran.⁸¹

⁸⁰ Ferry Dwi Hidayanto, “*Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri Se- Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo*”, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2011), 18.

⁸¹ Eko Djatmiko, “Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah Dan Sarana Prasarana Terhadap Kinerja Guru SMP Negeri Kota Semarang”, *Fokus Ekonomi*, Vol. 1, No. 2, (Desember, 2006), 24.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa indikator mutu sarana prasarana pendidikan meliputi: (1) Alat pelajaran, (2) Alat peraga, (3) Media pengajaran, (4) Bangunan dan (5) Perabot sekolah.

B. Tinjauan Pustaka

Banyak penelitian terdahulu yang relevan dengan pengaruh manajemen pembiayaan terhadap mutu sarana prasarana sekolah diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Windi Aprilianti fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Manajemen Pendidikan UIN Syarif Hidayatullah. Mengenai pengaruh manajemen pembiayaan pendidikan terhadap peningkatan mutu lulusan kelas IX di SMP Islam Raudatul Pamulang. Hasil perhitungan statistiknya menyatakan bahwa “terdapat pengaruh dari manajemen pembiayaan pendidikan terhadap peningkatan mutu lulusan kelas IX di SMP Islam Raudlatul Hikmah Pamulang”. Dengan Hasil uji t menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari manajemen pembiayaan pendidikan terhadap peningkatan mutu lulusan kelas IX di SMP Islam Raudlatul Hikmah Pamulang. Dengan hasil Thitung > Ttabel, yaitu $3,779 > 2,119$, yang artinya H_0 ditolak. Sedangkan hasil uji regresi linear, nilai konstanta (a) sebesar 38,833, yang artinya mutu lulusan SMP Islam Raudlatul Hikmah adalah sebesar 39. Nilai koefisien regresi variable harga (b) bernilai positif yaitu 0,521 yang artinya jika manajemen pembiayaan meningkat sebesar 0,521, maka mutu lulusan pun meningkat sebesar 0,521. Serta nilai RSquare sebesar 0,472 yang artinya, sebesar 47,2% mutu lulusan SMP Islam

Raudlatul Hikmah Pamulang dipengaruhi oleh manajemen pembiayaannya, dan sebesar 52,8% dipengaruhi oleh faktor lain.⁸²

Persamaan dengan penulis lakukan adalah mengetahui tingkat manajemen pembiayaan. Perbedaannya pada skripsi Windi Aprilianti peningkatan mutu lulusan menjadi objek dalam penelitian, sedangkan penulis mutu sarana prasarana yang menjadi objeknya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Samiyah tesis UIN Malik Ibrahim 2016 Program Magister Manajemen Pendidikan. Mengenai manajemen pembiayaan dalam mutu pendidikan di Universitas Islam Malang (UNISMA). Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa perencanaan anggaran pendidikan Universitas Islam Malang (UNISMA) disusun dan dituangkan dalam bentuk RAPBPT dengan menungkan program- program beserta anggaran untuk masing- masing program. Strategi pemenuhan pembiayaan pendidikan di Universitas Islam Malang (UNISMA) ada (4) bentuk starategi yang digunakan yakni: a. Strategi unit kerja mandiri, b. Sumbangan dana dari yayasan dan mahasiswa, c. Memiliki link dengan luar negeri, dan d. Pengajuan proposal kepada pemerintah. Evaluasi pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Universitas Islam Malang dilakukan melalui (4) tahap yakni 1) evaluasi hasil kegitan selama satu tahun/ persemester, 2) evaluasi hasil kinerja pegawai melalui program- program, 3) evaluasi dilakukan

⁸² Windi Aprilianti, "*Pengaruh Manajemen Pembiayaan Pendidikan Terhadap Peningkatan Mutu Lulusan Kelas IX Di SMP Islam Raudatul Pamulang*", Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017), 89.

sesuai dengan mekanisme organisasi. 4) evaluasi analisis SWOT meliputi hasil analisa internal dan eksternal.⁸³

Persamaan dengan penulis lakukan adalah mengetahui tingkat manajemen pembiayaan. Perbedaannya pada tesis Samiyah mutu pendidikan menjadi objek dalam penelitian, sedangkan penulis mutu sarana prasarana yang menjadi objeknya.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dian Amaliyani skripsi UIN Alauddin 2017 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Mengenai pengaruh manajemen sarana prasarana terhadap pencapaian akreditasi A di madrasah Aliyah Negeri 1 Makasar. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa, “ terdapat pengaruh antara manajemen sarana prasarana terhadap pencapaian akreditasi A di Madrasah Aliyah Negeri 1 Makasar. Karena thitung = 170,12 > t0,05 (36) tabel = 2,02, maka Ho diterima. ⁸⁴

Persamaan dengan penulis lakukan adalah mengetahui tingkat manajemen sarana prasarana. Perbedaannya pada skripsi Dian Amaliani manajemen sarana prasarana menjadi subyek dalam penelitian, sedangkan penulis manajemen pembiayaan yang menjadi subyeknya.

4. Penelitian mengenai manajemen pembiayaan pendidikan, fasilitas pembelajaran, dan mutu sekolah yang dilakukan oleh Ulpha Lisni Azhari dan Dedy Achmad Kurniady Jurnal Administrasi Pendidikan Vol. XXIII No. 2 Tahun 2016. Hasil

⁸³ Samiyah, “*Manajemen Pembiayaan dalam mutu pendidikan di Universitas Islam Malang (UNISMA)*”, Tesis, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016), 147.

⁸⁴ Dian Amaliyani, “*Pengaruh Manajemen Sarana Prasarana Terhadap Pencapaian Akreditasi A Di Madrasah Aliyah Negeri 1 Makasar*”, Skripsi, (Makassar: UIN Alauddin, 2017), 80.

penelitian ini mengemukakan bahwa Manajemen pembiayaan pendidikan dan fasilitas pembelajaran memberikan pengaruh terhadap mutu pendidikan SMP di Kabupaten Bandung Barat. Hal tersebut ditunjukkan oleh pengaruh yang cukup kuat dari manajemen pembiayaan pendidikan terhadap mutu pendidikan. Manajemen pembiayaan pendidikan dan fasilitas pembelajaran berpengaruh secara bersama-sama dalam peningkatan mutu pendidikan. Manajemen pembiayaan pendidikan juga memberikan pengaruh kepada fasilitas pembelajaran, dimana setiap pemanfaatan fasilitas pembiayaan harus didasari pada prinsip efisiensi terhadap kualitas dan kuantitas perlengkapan.⁸⁵

Persamaan dengan penulis lakukan adalah mengetahui tingkat manajemen pembiayaan. Perbedaannya pada jurnal Ulpha Lisni Azhari dan Dedy Achmad Kurniadi mutu pendidikan menjadi objek dalam penelitian, sedangkan penulis mutu sarana prasarana yang menjadi objeknya.

5. Penelitian mengenai implementasi manajemen pembiayaan terhadap peningkatan mutu sekolah di SD Negeri 1 Tonggalan Klaten Jawa Tengah oleh Mahmud Yunus, S.Pd. I Tesis UIN Sunan Kalijaga 2016 Jurusan Pendidikan Islam. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa pelaksanaan pembiayaan di SD Negeri 1 Tonggalan dilakukan melalui 2 tahap. Tahap pertama adalah penerimaan keuangan yang besarnya diambil dari besarnya tergantung jumlah siswa. Tahap kedua adalah pengeluaran pembiayaan yang terdiri 13 komponen. Dan evaluasi pembiayaan di SD Negeri 1 Tonggalan dilakukan dengan membuat laporan BOS

⁸⁵ Ulpha Lisni Azhari Dan Dedy Achmad Kurniady, "Manajemen Pembiayaan Pendidikan, Fasilitas Pembelajaran, Dan Mutu Sekolah", *Jurnal Administrasi Pendidikan*, Vol. XXIII No. 2, 2016, 33.

yang terdiri dari Kas Umum (K3), kas tunai (K4), buku pembantu pajak, buku pembantu Bank, Rekapitulasi Realisasi, penggunaan Dana Bos, realisasi penggunaan tiap jenis anggaran dan rekapitulasi laporan penggunaan dana.⁸⁶

Persamaan dengan penulis lakukan adalah mengetahui tingkat manajemen pembiayaan. Perbedaannya pada tesis Mahmud Yunus peningkatan mutu sekolah menjadi objek dalam penelitian, sedangkan penulis mutu sarana prasarana yang menjadi objeknya.

6. Penelitian mengenai manajemen pembiayaan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Universitas Dehasen Bengkulu oleh Suwarni Jurnal Ekombis Review, Vol. 3 No. 1 Tahun 2015. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa pengelolaan dana di Universitas Dehasen Bengkulu menganut azas efisiensi, efektivitas, produktivitas, terpadu, transparan dan dipertanggungjawaban melalui prosedur sesuai peraturan yang berlaku. Pengelolaan pembiayaan di Universitas Dehasen Bengkulu rektor hanya bertugas mengelola kegiatan pendidikan. Laporan RAPBM dipertanggungjawabkan kepada kepala BPH Yayasan Dehasen Bengkulu, rektor juga bertugas pelaksana bagaimana meningkatkan mutu pendidikan melalui pembiayaan yang telah diatur oleh pembantu direktur bidang keuangan.⁸⁷

Persamaan dengan penulis lakukan adalah mengetahui tingkat manajemen pembiayaan. Perbedaannya pada jurnal Suwarni mutu pendidikan menjadi objek dalam penelitian, sedangkan penulis mutu sarana prasarana yang menjadi objeknya.

⁸⁶ Mahmud Yunus, “Implementasi Manajemen Pembiayaan Terhadap Peningkatan Mutu Sekolah Di SD Negeri 1 Tonggalan Klaten Jawa Tengah”, Tesis, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016), 107.

⁸⁷ Suwarni, “Manajemen Pembiayaan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Universitas Dehasen Bengkulu”, *Jurnal ekombis Review*, Vol. 3 No.1 Tahun 2015.

C. Kerangka Berfikir

Pendidikan adalah segala pengaruh yang dilakukan oleh sekolah supaya anak didik mempunyai kemampuan yang sempurna dan mempunyai kesadaran penuh terhadap hubungan- hubungan dan tugas- tugas sosial mereka dalam kehidupan. Dalam upaya setiap pencapaian tujuan pendidikan baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, biaya pendidikan memiliki peran yang sangat menentukan. Oleh karena itu, pendidikan tanpa didukung biaya yang memadai, proses pendidikan di sekolah tidak akan berjalan sesuai harapan.

Menurut Departemen Pendidikan Nasional, manajemen keuangan merupakan tindakan pengurusan/ ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan.⁸⁸

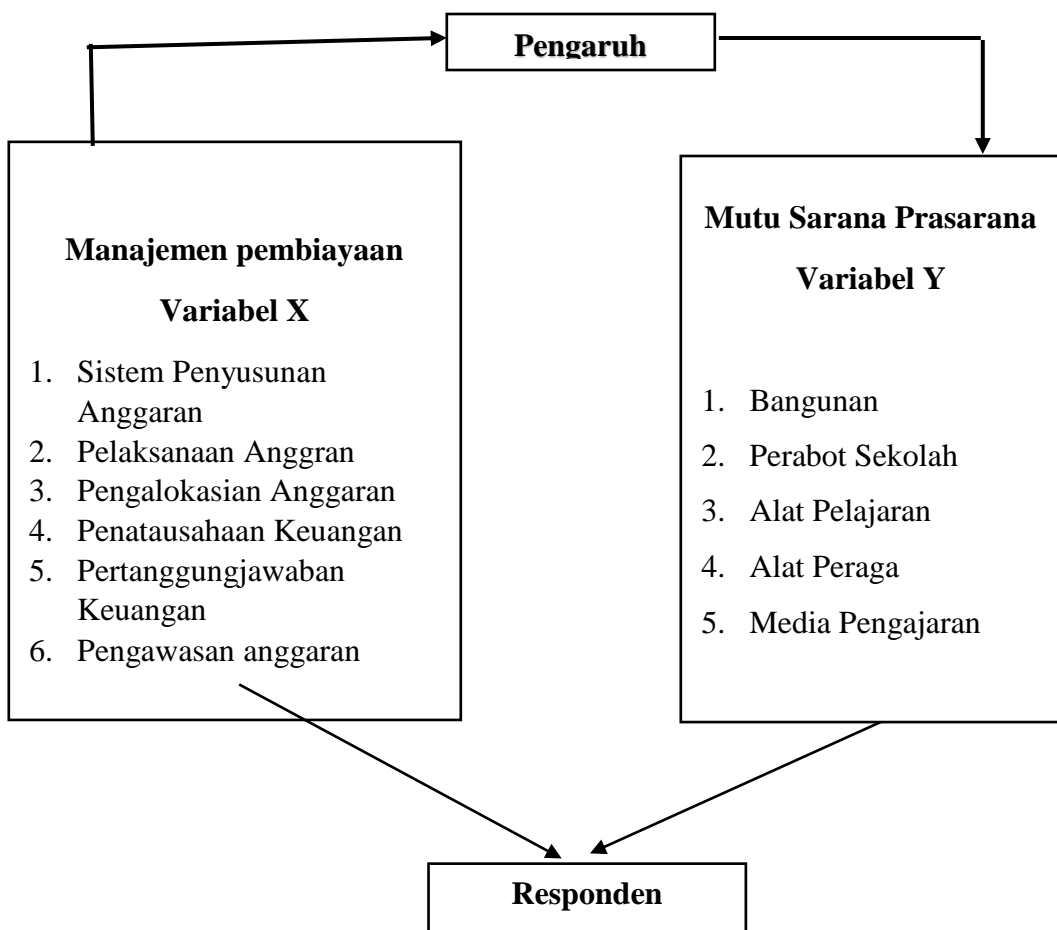
Sedangkan sarana prasarana pendidikan menurut Departemen Pendidikan Nasional adalah semua perangkat peralatan, bahan, seta perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Dan Prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah. Namun, mutu sarana prasarana dipengaruhi beberapa factor, salah satunya adalah manajemen pembiayaan, karenanya manajemen pembiayaan yang memiliki pengaruh terhadap mutu sarana prasarana.

⁸⁸ Kompri, *Standarisasi Kompetensi Kepala Sekolah Pendekatan Teori Untuk Praktek Profesional*, (Jakarta: Kencana, 2017), 155.

Dengan memperhatikan kerangka pemikiran serta penjelasan diatas maka penulis membuat skematis untuk dapat mengetahui seberapa besar pengaruh manajemen pembiayaan terhadap mutu sarana prasarana SMA Negeri 1 Ciomas Kabupaten Serang, serta untuk mempermudah dalam melakukan penelitian, sehingga membantu penyelesaian dalam mengumpulkan data penelitian.

Dari kerangka pemikiran diatas, dapat penulis gambarkan pengaruh manajemen pembiayaan terhadap mutu sarana prasarana dalam skema berikut:

Tabel 2. 2
Pengaruh Manajemen Pembiayaan Terhadap Mutu Sarana Prasarana



D. Pengajuan Hipotesis

Hipotesis berasal dari bahasa Yunani dari kata *hupo* dan *thesis*. Secara etimologi, hipotesis dibentuk dari dua kata, yaitu kata *hypo* dan kata *thesis*. *Hypo* berarti kurang, dan *thesis* berarti teori atau pendaapat. Kedua kata ini digunakan secara bersamaan menjadi *hypothesis* dan penyebutan dalam dialek Indonesia menjadi hipotesa kemudian menjadi hipotesis yang maksudnya adalah suatu kesimpulan yang masih kurang atau kesimpulan yang belum sempurna.⁸⁹ Sejalan dengan itu, Supardi menyebutkan bahwa hipotesis merupakan dugaan sementara dari penelitian yang akan dilakukan.⁹⁰

Secara umum hipotesis dibedakan menjadi hipotesis nihil atau hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif atau hipotesis tandingan (H_a/H_1).

1. Hipotesis Nol atau Hipotesis Nihil (H_0)

Hipotesis nol atau hipotesis nihil adalah hipotesis yang dirumuskan sebagai suatu persyaratan yang akan diuji. Dikatakan sebagai hipotesis nol karena hipotesis tersebut tidak memiliki perbedaan dan perbedaannya adalah nol dengan hipotesis yang sebenarnya.⁹¹

⁸⁹ M. Burhan Bngin, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenda Pres Group, 2015), 85.

⁹⁰Supardi, *Statisti Penelitian Pendidikan: Perhitungan, Penyajian, Penjelasan, Penafsiran Dan Penarikan Kesimpulan*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2017), 92.

⁹¹Supardi, *Statisti Penelitian Pendidikan: Perhitungan, Penyajian, Penjelasan, Penafsiran Dan Penarikan Kesimpulan*, 92.

2. Hipotesis Alternatif atau Hipotesis Tandingan (H_a/H_1)

Hipotesis alternatif adalah pernyataan yang mengungkapkan hubungan antara dua variabel atau menunjukkan perbedaan antara kelompok.⁹² Hipotesis alternatif atau hipotesis tandingan merupakan lawan dari hipotesis nol yang berarti hipotesis tersebut memiliki perbedaan dengan hipotesis yang sebenarnya.⁹³

Uji hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$H_0 : r_{xy} = 0$$

$$H_a : r_{xy} > 0$$

Keterangan:

H_0 = Tidak Terdapat pengaruh antara manajemen pembiayaan terhadap mutu sarana prasarana

H_a = Terdapat pengaruh antara manajemen pembiayaan dengan mutu sarana prasarana

Berdasarkan pada kajian teori dan kerangka berpikir, maka peneliti mengajukan hipotesis yang akan diuji kebenarannya dalam penelitian ini, yaitu terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara manajemen pembiayaan dengan mutu sarana prasarana.

⁹²Uma Sekaran, *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 138.

⁹³Supardi, *Statisti Penelitian Pendidikan: Perhitungan, Penyajian, Penjelasan, Penafsiran Dan Penarikan Kesimpulan*, 93.